

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum*, 16, 155–179.
- Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–12.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi*.
- Beni, K. I., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *INTEGRITAS*, 3(2), 37–78.
- Danil, E. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hamdani, & Misra, F. (2023). The Role of Investigation Audit for the Calculation of State Losses in Governor Corruption Cases Handled by the Corruption Eradication Commission for 2013-2022 Period. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 249–260.
- Hoesada, J. (2022). *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* (1 ed.). Penerbit ANDI.
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *British Accounting Review*, 51(5), 1–11.
- Juliani, H. (2010). Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 39(1), 44–51.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2).
- Lio, M. C., Liu, M. C., & Ou, Y. P. (2011). Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models. *Government Information Quarterly*, 28(1), 47–53.
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Mitra Wacana Media.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Audit Investigatif*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/audit-investigatif>
- Putri Yulia, R., A., K., & Agoes, S. (2016). Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Bina Adhyaksa*, 6(2), 135–152.
- Ramadhan, A. & I. R. (2020, September 30). *KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembali Biaya Politik Artikel ini KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembali Biaya Politik*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/12074871/kpk-identifikasi-6-modus-korupsi-kepala-daerah-untuk-kembali-biaya>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Rianto, B. S. & E. R. (2020). *Koruptor Go to Hell!! Gurita Korupsi di Indonesia (Vol. 3)*. Penerbit Andi.
- RS, I. R. (2014). Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 350–358.

- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Suhendar. (2015). *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Setara Press.
- Suhendi, D. (2020). Bilakah Kepala Daerah Tak Korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 50–61.
- Suta, I. M. G. D., Prabandari, I. G. A. M., & Astariyani, N. L. G. (2021). Determining State's Financial Losses in Corruption: An Institutional Power and Constraint in Indonesia. *Lentera Hukum*, 8(1), 95–114.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (2 ed.). Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (2 ed.). Salemba Empat.
- Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189.
- Umar, H. (2016). *Corruption the Devil*. Penerbit Univeritas Trisakti.
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan (Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet). *INTEGRITAS*, 4(2), 1–23.
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 7(2), 31–53.
- Zabar, T. (2022). *Korupsi Kepala Daerah*. Indonesia Corruption Watch.